

PERS RILIS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan Toboali, 30 Juli 2025

Menyemai Etika Demokrasi di Masa Hening Politik: Cara Bawaslu Bangka Selatan Menjaga Nalar Publik

TOBOALI — Di tengah masa non-tahapan Pemilu yang tenang, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tidak memilih diam. Justru di saat “hening politik” inilah lembaga pengawas pemilu itu menanam benih paling penting bagi keberlanjutan demokrasi: **etika dan kesadaran publik**.

“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga bagaimana kita menjaga akal sehat publik agar tidak mudah digiring oleh kepentingan sesaat,” ujar **Amri R**, di Toboali, Senin (30/07/2025).

Dalam suasana politik yang belum ramai, Bawaslu Bangka Selatan memusatkan perhatian pada **penguatan etika penyelenggara dan pendidikan demokrasi publik**. Melalui diskusi terbuka, literasi digital, dan refleksi etik penyelenggara, lembaga ini ingin memastikan bahwa jeda antar pemilu bukan berarti jeda pengawasan moral demokrasi.

Menjaga “Nalar Publik” di Tengah Sunyi Politik

Di masa ketika baliho kampanye belum kembali menghiasi jalanan dan isu politik belum memanaskan, Bawaslu Bangka Selatan memanfaatkan ruang sunyi itu untuk **menyemai kesadaran kritis warga**. Program edukasi pemilih muda dan kelas reflektif bagi pengawas lapangan digelar di sejumlah kecamatan seperti **Toboali, Air Gegas, dan Tukak Sadai**.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pengawasan tidak berhenti pada masa pemungutan suara. Ia adalah proses panjang menjaga integritas publik dari manipulasi informasi dan politik uang,” jelas **Amri R**.

Melalui kerja-kerja kecil dan dialog komunitas, Bawaslu berupaya menanamkan nilai bahwa demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan budaya yang harus dipelihara terus-menerus.

Merefleksikan Etika Penyelenggara

Bawaslu Bangka Selatan juga memperkuat aspek **kode etik penyelenggara pemilu**. Pengawasan internal terhadap perilaku jajaran pengawas desa hingga kabupaten dilakukan untuk memastikan profesionalitas dan keteladanan. Langkah ini berangkat dari pembelajaran masa lalu — di mana integritas penyelenggara menjadi titik krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

“Etika adalah fondasi. Kami percaya bahwa menjaga keadilan pemilu harus dimulai dari sikap jujur dan adil penyelenggaranya,” tutur **Amri R.**

Selain evaluasi internal, Bawaslu juga menggandeng akademisi dan tokoh masyarakat dalam **Forum Refleksi Demokrasi Bangka Selatan**, sebuah ruang dialog terbuka yang membahas nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab publik dalam pengawasan pemilu.

Membangun Demokrasi dari Hulu: Pendidikan Etik dan Literasi Digital

Bawaslu Bangka Selatan tidak hanya fokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga **pada penguatan nalar publik di ruang digital**. Di era informasi yang serba cepat, manipulasi opini dan misinformasi politik menjadi ancaman baru. Untuk itu, lembaga ini mengembangkan kampanye literasi digital bertajuk “*Bijak di Lini Waktu*” yang menyasar kalangan pelajar dan komunitas muda.

“Di ruang digital, etika adalah pagar pertama demokrasi. Kalau pagar itu runtuh, opini publik bisa dengan mudah dikendalikan,” ungkap **Sabihis.**

Kegiatan tersebut diisi dengan pelatihan verifikasi informasi, simulasi pemantauan konten politik, serta diskusi tentang etika bermedia sosial bagi pemilih muda.

Makna di Balik Hening

Di luar hiruk-pikuk politik, langkah Bawaslu Bangka Selatan mencerminkan cara lembaga ini **menafsirkan ulang peran pengawasan** — bukan sekadar mengawasi prosedur, melainkan **merawat jiwa demokrasi itu sendiri**.

Hening politik dimaknai bukan sebagai masa istirahat, tetapi **ruang jeda untuk membangun kesadaran baru**: bahwa etika, akal sehat, dan partisipasi publik adalah tiga tiang utama yang menjaga demokrasi tetap tegak, bahkan saat pesta belum dimulai.

“Tugas kami bukan hanya mengawasi tahapan, tapi menjaga agar nalar publik tetap waras — agar rakyat tetap jadi pusat demokrasi, bukan objeknya,” tutup Sabihis.

**Kontak Media:
Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan**

